



**BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 48 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 48 TAHUN 2023

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ Tentang Pendanaan Kegiatan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2023, maka Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2023 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Insentif Fiskal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1331);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335).
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 715).
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 759).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023 Nomor 0279) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp.990.871.933.348,- ditambah sejumlah Rp. 14.291.658.141 sehingga menjadi Rp. 1.005.163.591.489,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula : Rp. 955.391.523.500,-

b. Bertambah/(Berkurang) : Rp. 19.028.237.000,-

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 974.419.760.500,-

2. Belanja Daerah

a. Semula : Rp. 988.121.933.348,-

b. Bertambah/(Berkurang) : Rp. 14.291.658.141,-

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.002.413.591.489,-

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula : Rp. 35.480.409.848,-

2) Bertambah/(Berkurang) : (Rp. 4.736.578.859,-)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 30.743.830.989,-

b. Pengeluaran

1) Semula : Rp. 2.750.000.000,-

2) Bertambah/(Berkurang) : Rp. 0,-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 2.750.000.000,-

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 27.993.830.989,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,-

2. Ketentuan pada Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Desa

3. Ketentuan pada Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan pada Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di P i r u
Pada tanggal, 16 November 2023

PENJABAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



ANDI CHANDRA AS'ADUDDIN

Diundangkan di P i r u
Pada tanggal, 17 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



LEVERNE ALVIN TUASUUN

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 0323

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Bahwa untuk menjawab kebutuhan pelayanan publik baik yang bersifat mendesak, darurat atau kebutuhan lainnya yang mengharuskan adanya perubahan APBD guna membiayai seluruh atau sebagian kegiatan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya diatur dalam APBD dan penjabarannya dengan Peraturan Kepala Daerah dan lebih lanjut diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 107 menyebutkan APBD disusun sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan APBD; dan/atau, keadaan darurat dan keperluan mendesak. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi, APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Lampiran I : Peraturan Bupati Seram Bagian Barat
Nomor : 48 Tahun 2023
Tanggal : 16 November 2023

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	PENDAPATAN DAERAH				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	42.000.000.000	26.500.000.000	(15.500.000.000)	37 %
	Pajak Daerah	8.835.000.000	8.835.000.000	0	0 %
06	Pajak Hotel	347.500.000	267.500.000	(80.000.000)	23 %
06 01	Pajak Hotel	130.000.000	60.000.000	(70.000.000)	54 %
06 01 0001	Pajak Hotel	130.000.000	60.000.000	(70.000.000)	54 %
06 03	Pajak Losmen	35.000.000	5.000.000	(30.000.000)	86 %
06 03 0001	Pajak Losmen	35.000.000	5.000.000	(30.000.000)	86 %
06 07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	97.500.000	97.500.000	0	0 %
06 07 0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	97.500.000	97.500.000	0	0 %
06 08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	85.000.000	105.000.000	20.000.000	24 %
06 08 0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	85.000.000	105.000.000	20.000.000	24 %
07	Pajak Restoran	1.030.000.000	875.539.720	(154.460.280)	15 %
07 01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	275.000.000	100.000.000	(175.000.000)	64 %
07 01 0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	275.000.000	100.000.000	(175.000.000)	64 %
07 02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	650.000.000	650.000.000	0	0 %
07 02 0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	650.000.000	650.000.000	0	0 %
07 04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	35.000.000	5.000.000	(30.000.000)	86 %
07 04 0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	35.000.000	5.000.000	(30.000.000)	86 %
07 05	Pajak Warung dan Sejenisnya	40.000.000	30.000.000	(10.000.000)	25 %
07 05 0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	40.000.000	30.000.000	(10.000.000)	25 %
07 07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	30.000.000	90.539.720	60.539.720	202 %
07 07 0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	30.000.000	90.539.720	60.539.720	202 %
08	Pajak Hiburan	65.000.000	20.000.000	(45.000.000)	69 %
08 05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	60.000.000	15.000.000	(45.000.000)	75 %
08 05 0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	60.000.000	15.000.000	(45.000.000)	75 %
08 06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	5.000.000	5.000.000	0	0 %
08 06 0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	5.000.000	5.000.000	0	0 %
09	Pajak Reklame	390.000.000	443.764.890	53.764.890	14 %
09 01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	225.000.000	125.000.000	(100.000.000)	44 %
09 01 0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	225.000.000	125.000.000	(100.000.000)	44 %
09 02	Pajak Reklame Kain	85.000.000	278.764.890	193.764.890	228 %

02.0001	Pajak Reklame Kain	85.000.000	278.764.890	193.764.890	228 %
03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	80.000.000	40.000.000	(40.000.000)	50 %
03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	80.000.000	40.000.000	(40.000.000)	50 %
04	Pajak Penerangan Jalan	3.400.000.000	3.400.000.000	0	0 %
04	Pajak Penerangan Jalan Dihakikan Sendiri	3.400.000.000	3.400.000.000	0	0 %
04.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihakikan Sendiri	3.400.000.000	3.400.000.000	0	0 %
05	Pajak Parkir	500.000	500.000	0	0 %
05	Pajak Parkir	500.000	500.000	0	0 %
05.0001	Pajak Parkir	500.000	500.000	0	0 %
06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.162.000.000	3.067.578.594	(94.421.406)	3 %
06.07	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.162.000.000	3.067.578.594	(94.421.406)	3 %
06.07.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.162.000.000	3.067.578.594	(94.421.406)	3 %
07	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	380.000.000	380.000.000	0	0 %
07.01	PBBP2	380.000.000	380.000.000	0	0 %
07.01.0001	PBBP2	380.000.000	380.000.000	0	0 %
08	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	60.000.000	380.116.796	320.116.796	534 %
08.01	BPHTB-Pemindahan Hak	60.000.000	380.116.796	320.116.796	534 %
08.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	60.000.000	380.116.796	320.116.796	534 %
09	Retribusi Daerah	2.637.770.250	2.670.601.628	32.831.378	1 %
10	Retribusi Jasa Umum	1.660.787.000	1.693.618.378	32.831.378	2 %
10.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.275.000.000	1.307.831.378	32.831.378	3 %
10.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	50.000.000	82.831.378	32.831.378	66 %
10.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0 %
10.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	25.000.000	25.000.000	0	0 %
10.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	10.000.000	10.000.000	0	0 %
10.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	10.000.000	10.000.000	0	0 %
10.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	29.016.000	29.016.000	0	0 %
10.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	29.016.000	29.016.000	0	0 %
10.05	Retribusi Pelayanan Pasar	219.082.400	219.082.400	0	0 %
10.05.0001	Retribusi Pelataran	50.000.000	50.000.000	0	0 %
10.05.0002	Retribusi Los	94.082.400	94.082.400	0	0 %
10.05.0003	Retribusi Kios	75.000.000	75.000.000	0	0 %
10.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	125.325.000	125.325.000	0	0 %
10.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	125.325.000	125.325.000	0	0 %
11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	2.363.600	2.363.600	0	0 %
11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	2.363.600	2.363.600	0	0 %
12	Retribusi Jasa Usaha	726.981.250	726.981.250	0	0 %
12.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	150.000.000	150.000.000	0	0 %
12.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	150.000.000	150.000.000	0	0 %
12.03	Retribusi Tempat Pelelangan	100.000.000	100.000.000	0	0 %
12.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	100.000.000	100.000.000	0	0 %
12.04	Retribusi Terminal	279.960.000	279.960.000	0	0 %

04 0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	24.960.000	24.960.000	0	0 %
04 0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	255.000.000	255.000.000	0	0 %
07	Retribusi Rumah Potong Hewan	6.375.000	6.375.000	0	0 %
07 0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	6.375.000	6.375.000	0	0 %
08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	23.968.000	23.968.000	0	0 %
08 0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	23.968.000	23.968.000	0	0 %
09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	148.296.250	148.296.250	0	0 %
09 0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	148.296.250	148.296.250	0	0 %
10	Retribusi Penyeberangan di Air	18.382.000	18.382.000	0	0 %
10 0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	18.382.000	18.382.000	0	0 %
	Retribusi Penzinan Tertentu	250.002.000	250.002.000	0	0 %
01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	250.002.000	250.002.000	0	0 %
01 0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	250.002.000	250.002.000	0	0 %
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.194.444.480	3.618.405.024	423.960.544	13 %
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.194.444.480	3.618.405.024	423.960.544	13 %
01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.169.444.480	3.593.405.024	423.960.544	13 %
01 0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.169.444.480	3.593.405.024	423.960.544	13 %
03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	25.000.000	25.000.000	0	0 %
03 0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	25.000.000	25.000.000	0	0 %
	Lain-lain PAD yang Sah	27.332.785.270	11.375.993.348	(15.956.791.922)	58 %
	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	120.800.000	120.800.000	0	0 %
01	Hasil Sewa BMD	120.800.000	120.800.000	0	0 %
01 0001	Hasil Sewa BMD	120.800.000	120.800.000	0	0 %
5	Jasa Giro	1.821.154.303	1.821.154.303	0	0 %
5 01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.721.154.303	1.721.154.303	0	0 %
5 01 0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.721.154.303	1.721.154.303	0	0 %
5 02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000	100.000.000	0	0 %
5 02 0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000	100.000.000	0	0 %
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
1 01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
1 01 0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
2	Pendapatan Denda Pajak Daerah	87.500.000	87.500.000	0	0 %
2 06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	17.000.000	17.000.000	0	0 %
2 06 0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	17.000.000	17.000.000	0	0 %
2 07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	10.000.000	10.000.000	0	0 %
2 07 0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	10.000.000	10.000.000	0	0 %
2 09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	8.000.000	8.000.000	0	0 %
2 09 0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	5.000.000	5.000.000	0	0 %
2 09 0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	3.000.000	3.000.000	0	0 %
2 14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	40.000.000	40.000.000	0	0 %
2 14 0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	40.000.000	40.000.000	0	0 %
2 15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	12.500.000	12.500.000	0	0 %

2.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	12.500.000	12.500.000	0	0 %
3	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	10.000.000	10.000.000	0	0 %
3.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	10.000.000	10.000.000	0	0 %
3.01.0011	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	10.000.000	10.000.000	0	0 %
3	Pendapatan dari Pengembalian	8.293.330.967	7.836.539.045	(456.791.922)	6 %
3.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	36.822.400	364.858.130	328.035.730	891 %
3.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	36.822.400	364.858.130	328.035.730	891 %
3.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	1.000.000.000	2.055.631.069	1.055.631.069	106 %
3.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	1.000.000.000	2.055.631.069	1.055.631.069	106 %
3.10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.256.508.567	5.416.049.846	(1.840.458.721)	25 %
3.10.0054	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	7.256.508.567	5.416.049.846	(1.840.458.721)	25 %
3	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	15.500.000.000	0	(15.500.000.000)	100 %
3.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	15.500.000.000	0	(15.500.000.000)	100 %
3.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	15.500.000.000	0	(15.500.000.000)	100 %
	PENDAPATAN TRANSFER	913.391.523.500	930.919.760.500	17.528.237.000	2 %
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	893.888.074.000	911.416.311.000	17.528.237.000	2 %
	Dana Perimbangan	804.095.673.000	805.095.673.000	1.000.000.000	0 %
1.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	10.047.112.000	11.047.112.000	1.000.000.000	10 %
1.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.123.039.000	1.123.039.000	0	0 %
1.01.0002	DBH PPh Pasal 21	1.928.734.000	1.928.734.000	0	0 %
1.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	1.055.234.000	1.055.234.000	0	0 %
1.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	385.369.000	385.369.000	0	0 %
1.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0	1.000.000.000	1.000.000.000	100 %
1.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	742.260.000	742.260.000	0	0 %
1.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	4.812.476.000	4.812.476.000	0	0 %
1.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	584.966.514.000	584.966.514.000	0	0 %
1.02.0001	DAU	584.966.514.000	584.966.514.000	0	0 %
1.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	68.993.382.000	68.993.382.000	0	0 %
1.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	688.221.000	688.221.000	0	0 %
1.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	6.562.612.000	6.562.612.000	0	0 %
1.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.165.029.000	7.165.029.000	0	0 %
1.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	4.798.214.000	4.798.214.000	0	0 %
1.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	35.847.427.000	35.847.427.000	0	0 %
1.03.0054	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	8.265.931.000	8.265.931.000	0	0 %
1.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	983.831.000	983.831.000	0	0 %
1.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	580.761.000	580.761.000	0	0 %
1.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	4.101.356.000	4.101.356.000	0	0 %
1.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	140.088.665.000	140.088.665.000	0	0 %
1.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	39.070.350.000	39.070.350.000	0	0 %
1.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.285.000.000	2.285.000.000	0	0 %
1.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	38.078.777.000	38.078.777.000	0	0 %
1.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.885.000.000	1.885.000.000	0	0 %

04 0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	12.847.422.000	12.847.422.000	0	0 %
04 0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.017.900.000	5.017.900.000	0	0 %
04 0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan	129.920.000	129.920.000	0	0 %
04 0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	35.753.776.000	35.753.776.000	0	0 %
04 0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	490.400.000	490.400.000	0	0 %
04 0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.454.245.000	3.454.245.000	0	0 %
04 0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000	438.800.000	0	0 %
04 0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	637.075.000	637.075.000	0	0 %
2	Dana Insentif Daerah (DID)	0	14.084.507.000	14.084.507.000	100 %
2 01	DID	0	14.084.507.000	14.084.507.000	100 %
2 01 0001	DID	0	14.084.507.000	14.084.507.000	100 %
5	Dana Desa	89.792.401.000	92.236.131.000	2.443.730.000	3 %
5 01	Dana Desa	89.792.401.000	92.236.131.000	2.443.730.000	3 %
5 01 0001	Dana Desa	89.792.401.000	92.236.131.000	2.443.730.000	3 %
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	19.503.449.500	19.503.449.500	0	0 %
	Pendapatan Bagi Hasil	19.503.449.500	19.503.449.500	0	0 %
01 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	19.503.449.500	19.503.449.500	0	0 %
01 01 0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.143.121.059	3.143.121.059	0	0 %
01 01 0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.779.774.627	2.779.774.627	0	0 %
01 01 0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.278.960.107	5.278.960.107	0	0 %
01 01 0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	8.000.000	8.000.000	0	0 %
01 01 0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.293.593.707	8.293.593.707	0	0 %
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	17.000.000.000	17.000.000.000	100 %
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	17.000.000.000	17.000.000.000	100 %
22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0	17.000.000.000	17.000.000.000	100 %
22 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0	17.000.000.000	17.000.000.000	100 %
22 01 0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0	17.000.000.000	17.000.000.000	100 %
	Jumlah Pendapatan	955.391.523.500	974.419.760.500	19.028.237.000	2 %
	BELANJA				
	BELANJA OPERASI	703.475.924.065	685.705.600.026	(17.770.324.039)	3 %
	Belanja Pegawai	428.664.918.578	407.810.753.220	(20.854.165.358)	5 %
01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	314.199.769.178	309.160.114.112	(5.039.655.066)	2 %
01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	241.055.593.615	236.340.924.774	(4.714.668.841)	2 %
01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	236.362.431.760	223.758.124.006	(12.604.307.754)	5 %
01 01 0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	4.693.161.855	12.582.800.768	7.889.638.913	168 %
01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	21.947.171.765	21.939.069.957	(8.101.808)	0 %
01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	21.947.171.765	20.754.801.001	(1.192.370.764)	5 %
01 02 0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	0	1.184.268.956	1.184.268.956	100 %
01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.786.036.725	5.362.651.125	(423.385.600)	7 %
01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.786.036.725	5.362.651.125	(423.385.600)	7 %
01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.548.429.075	15.472.734.425	(75.694.650)	0 %

04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	15.548.429.075	14.606.977.400	(941.451.675)	6 %
04 0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	865.757.025	865.757.025	100 %
05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.383.362.850	3.579.214.000	195.851.150	6 %
05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.383.362.850	3.579.214.000	195.851.150	6 %
06	Belanja Tunjangan Beras ASN	14.664.009.808	14.501.536.153	(162.473.655)	1 %
06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	14.664.009.808	13.626.504.334	(1.037.505.474)	7 %
06 0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	875.031.819	875.031.819	100 %
07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	159.761.899	149.701.839	(10.060.060)	6 %
07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	159.761.899	149.701.839	(10.060.060)	6 %
08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.538.050	3.453.391	(84.659)	2 %
08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.538.050	3.418.819	(119.231)	3 %
08 0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	34.572	34.572	100 %
09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.701.760.100	9.838.025.200	136.265.100	1 %
09 0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	9.701.760.100	9.340.658.250	(361.101.850)	4 %
09 0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	0	497.366.950	497.366.950	100 %
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	487.537.620	493.202.656	5.665.036	1 %
10 0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	487.537.620	469.093.276	(18.444.344)	4 %
10 0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	0	24.109.380	24.109.380	100 %
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.462.567.671	1.479.600.592	17.032.921	1 %
11 0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.462.567.671	1.407.275.810	(55.291.861)	4 %
11 0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	0	72.324.782	72.324.782	100 %
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	34.230.000.000	13.748.496.108	(20.481.503.892)	60 %
01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	34.230.000.000	11.741.605.423	(22.488.394.577)	66 %
01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	34.230.000.000	11.741.605.423	(22.488.394.577)	66 %
04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	0	2.006.890.685	2.006.890.685	100 %
04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	0	2.006.890.685	2.006.890.685	100 %
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	62.701.421.000	67.483.414.600	4.781.993.600	8 %
02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	34.200.000	0	(34.200.000)	100 %
02 0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	10.200.000	0	(10.200.000)	100 %
02 0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	24.000.000	0	(24.000.000)	100 %
03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	38.078.777.000	38.078.777.000	0	0 %
03 0001	Belanja TPG PNSD	38.078.777.000	38.078.777.000	0	0 %
04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	12.847.422.000	17.149.945.600	4.302.523.600	33 %
04 0001	Belanja TKG PNSD	12.847.422.000	17.149.945.600	4.302.523.600	33 %
05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.885.000.000	1.885.000.000	0	0 %
05 0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.885.000.000	1.885.000.000	0	0 %
06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.624.452.000	2.584.452.000	(40.000.000)	2 %
06 0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.624.452.000	2.584.452.000	(40.000.000)	2 %
07	Belanja Honorarium	7.231.570.000	7.785.240.000	553.670.000	8 %
07 0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.676.310.000	7.187.560.000	511.250.000	8 %
07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	555.260.000	597.680.000	42.420.000	8 %
	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	16.856.042.600	16.856.042.600	0	0 %

04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	575.820.000	671.790.000	95.970.000	17 %
04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	575.820.000	671.790.000	95.970.000	17 %
04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	82.630.800	82.630.800	0	0 %
04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	82.630.800	82.630.800	0	0 %
04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	105.892.400	105.892.400	0	0 %
04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	105.892.400	105.892.400	0	0 %
04.04	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000	57.582.000	0	0 %
04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000	57.582.000	0	0 %
04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	834.939.000	974.095.500	139.156.500	17 %
04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	834.939.000	974.095.500	139.156.500	17 %
04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	97.194.000	97.194.000	0	0 %
04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	97.194.000	97.194.000	0	0 %
04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000	3.780.000.000	0	0 %
04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000	3.780.000.000	0	0 %
04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000	945.000.000	0	0 %
04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000	945.000.000	0	0 %
04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	89.588.400	98.432.824	8.844.424	10 %
04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	89.588.400	98.432.824	8.844.424	10 %
04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.681.296.000	5.507.425.076	(173.870.924)	3 %
04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	162.480.800	68.509.876	(93.970.924)	58 %
04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.722.400	1.722.400	0	0 %
04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	1.742.800	1.742.800	0	0 %
04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.515.350.000	5.435.450.000	(79.900.000)	1 %
04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.606.100.000	4.536.000.000	(70.100.000)	2 %
04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.606.100.000	4.536.000.000	(70.100.000)	2 %
05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	181.085.800	181.085.800	0	0 %
05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.238.000	56.238.000	0	0 %
05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.238.000	56.238.000	0	0 %
05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.873.600	7.873.600	0	0 %
05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.873.600	7.873.600	0	0 %
05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	101.228.400	101.228.400	0	0 %
05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	101.228.400	101.228.400	0	0 %
05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.355.200	8.355.200	0	0 %
05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.355.200	8.355.200	0	0 %
05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	233.800	233.800	0	0 %
05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	233.800	233.800	0	0 %
05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.400	1.400	0	0 %
05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.400	1.400	0	0 %
05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.613.600	6.613.600	0	0 %
05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.613.600	6.613.600	0	0 %
05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	135.800	135.800	0	0 %
05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	135.800	135.800	0	0 %

05	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	406.000	406.000	0	0 %
05.01.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	406.000	406.000	0	0 %
05	Belanja Penempatan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	496.600.000	381.600.000	(115.000.000)	23 %
05.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	316.600.000	201.600.000	(115.000.000)	36 %
05.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	316.600.000	201.600.000	(115.000.000)	36 %
05.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	180.000.000	180.000.000	0	0 %
05.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	180.000.000	180.000.000	0	0 %
	Belanja Barang dan Jasa	262.022.580.487	251.395.281.876	(10.627.298.611)	4 %
01	Belanja Barang	61.566.494.987	51.599.090.055	(9.967.404.932)	16 %
01.01	Belanja Barang Pakai Habis	61.410.631.987	51.461.442.055	(9.949.189.932)	16 %
01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	283.509.400	1.650.550.000	1.367.040.600	482 %
01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.036.482.000	5.083.146.900	(1.953.335.100)	28 %
01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	162.802.000	111.002.000	(51.800.000)	32 %
01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Rihit Tanaman	1.876.748.000	356.152.200	(1.520.595.800)	81 %
01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Temak/Bibit Ikan	104.000.000	156.610.000	52.610.000	51 %
01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.281.142.845	7.446.192.045	165.049.200	2 %
01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	555.993.000	532.278.000	(23.715.000)	4 %
01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	27.860.000	21.848.000	(1.012.000)	4 %
01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	292.800.000	300.000.000	7.200.000	2 %
01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.359.249.644	1.933.206.200	(426.043.444)	18 %
01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	103.404.800	106.904.800	3.500.000	3 %
01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.101.598.348	3.176.005.688	74.407.340	2 %
01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	622.562.200	402.725.350	(219.836.850)	35 %
01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	125.951.500	48.202.500	(77.749.000)	62 %
01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	209.426.000	93.367.000	(116.059.000)	55 %
01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	9.000.000	933.426.050	924.426.050	10.271 %
01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0	89.521.900	89.521.900	100 %
01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	219.500.000	83.500.000	(136.000.000)	62 %
01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	154.178.500	94.313.400	(59.865.100)	39 %
01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	0	300.000.000	300.000.000	100 %
01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.771.243.000	1.641.443.000	(129.800.000)	7 %
01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	21.117.166.000	12.534.762.000	(8.582.404.000)	41 %
01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0	188.000.000	188.000.000	100 %
01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.247.207.300	2.436.729.122	1.189.521.822	95 %
01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	12.231.450	13.305.600	1.074.150	9 %
01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.862.750.000	2.609.449.600	(253.300.400)	9 %
01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.872.145.000	1.265.599.700	(1.606.545.300)	56 %
01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	372.500.000	459.500.000	87.000.000	23 %
01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.834.131.000	6.644.086.000	809.955.000	14 %
01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	39.000.000	0	(39.000.000)	100 %
01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	25.500.000	0	(25.500.000)	100 %
01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	4.000.000	4.000.000	0	0 %

01 0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	64.000.000	0	(64.000.000)	100 %
01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	28.300.000	175.155.000	146.855.000	519 %
01 0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	30.000.000	90.000.000	60.000.000	200 %
01 0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0	7.000.000	7.000.000	100 %
01 0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	114.000.000	15.000.000	(99.000.000)	87 %
01 0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	27.500.000	17.500.000	(10.000.000)	36 %
01 0076	Belanja Pakaian Olahraga	443.750.000	440.960.000	(2.790.000)	1 %
01 0077	Belanja Pakaian Paskibraka	24.000.000	0	(24.000.000)	100 %
02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	155.863.000	137.648.000	(18.215.000)	12 %
02 0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	91.043.000	30.000.000	(61.043.000)	67 %
02 0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	37.680.000	0	(37.680.000)	100 %
02 0005	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	6.284.000	0	(6.284.000)	100 %
02 0011	Belanja Pipa-Pipa Fiber Glass	1.928.000	0	(1.928.000)	100 %
02 0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	18.928.000	107.648.000	88.720.000	469 %
02	Belanja Jasa	82.623.055.349	68.122.629.261	5.499.563.912	7 %
02 01	Belanja Jasa Kantor	51.358.293.074	47.314.592.600	(4.043.700.474)	8 %
02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.600.750.000	2.150.450.000	549.700.000	34 %
02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	613.230.000	578.030.000	(35.200.000)	6 %
02 01 0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	3.600.000	21.600.000	18.000.000	500 %
02 01 0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	16.600.000	55.400.000	38.600.000	230 %
02 01 0007	Honorarium Rohaniwan	0	3.600.000	3.600.000	100 %
02 01 0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	60.000.000	124.400.000	64.400.000	107 %
02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.909.600.000	2.280.100.000	370.500.000	19 %
02 01 0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	0	225.600.000	225.600.000	100 %
02 01 0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	5.147.820.000	5.147.820.000	0	0 %
02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	11.411.201.000	10.084.001.000	(1.327.200.000)	12 %
02 01 0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	2.675.000	102.675.000	100.000.000	3.738 %
02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	130.800.000	508.800.000	378.000.000	289 %
02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.062.400.000	2.688.000.000	(174.400.000)	6 %
02 01 0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	200.000.000	900.000.000	700.000.000	350 %
02 01 0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	146.100.000	136.900.000	(7.200.000)	5 %
02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	145.500.000	127.000.000	(18.500.000)	13 %
02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	16.200.400.000	13.617.100.000	(2.383.300.000)	15 %
02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	367.171.000	1.444.842.000	1.077.671.000	294 %
02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.973.700.000	956.450.000	(2.017.250.000)	68 %
02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	327.800.000	280.464.000	(47.336.000)	14 %
02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	46.750.000	20.000.000	(26.750.000)	57 %
02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	646.500.000	362.500.000	(284.000.000)	44 %
02 01 0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	13.700.000	6.900.000	(6.800.000)	50 %
02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	26.800.000	70.800.000	44.000.000	164 %
02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	733.210.474	332.550.000	(400.660.474)	55 %
02 01 0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	25.000.000	50.000.000	25.000.000	100 %

01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	30.000.000	37.000.000	7.000.000	23 %
01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	5.500.000	46.500.000	41.000.000	745 %
01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	9.900.000	0	(9.900.000)	100 %
01.0059	Belanja Tagihan Telepon	43.000.000	27.300.000	(15.700.000)	37 %
01.0060	Belanja Tagihan Air	130.750.000	81.525.000	(49.225.000)	38 %
01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.839.200.000	2.417.908.000	(421.292.000)	15 %
01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	158.400.000	74.800.000	(83.600.000)	53 %
01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	581.679.600	547.987.600	(33.692.000)	6 %
01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	13.260.000	8.160.000	(5.100.000)	38 %
01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Penzinan	703.200.000	556.810.000	(146.390.000)	21 %
01.0071	Belanja Lembur	68.952.000	56.826.000	(12.126.000)	18 %
01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	962.944.000	781.594.000	(181.350.000)	19 %
02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	21.010.384.544	27.276.245.923	6.265.861.379	30 %
02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	805.242.144	885.495.515	80.253.371	10 %
02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	10.500.000.000	16.575.000.000	6.075.000.000	58 %
02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPJS dan BP Kelas 3	8.618.400.000	8.618.400.000	0	0 %
02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPJS dan BP Kelas 3	650.259.200	650.259.200	0	0 %
02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0	121.608.000	121.608.000	100 %
02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	206.213.532	200.713.536	(5.499.996)	3 %
02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	230.269.668	224.769.672	(5.499.996)	2 %
03	Belanja Sewa Tanah	34.200.000	144.000.000	109.800.000	321 %
03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	34.200.000	144.000.000	109.800.000	321 %
04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.731.897.800	3.326.427.800	(405.470.000)	11 %
04.0031	Belanja Sewa Peralatan Selam	2.250.000	0	(2.250.000)	100 %
04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	118.970.000	32.720.000	(86.250.000)	72 %
04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	947.340.000	559.580.000	(387.760.000)	41 %
04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	73.000.000	90.000.000	17.000.000	23 %
04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	324.000.000	356.000.000	32.000.000	10 %
04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	136.000.000	40.000.000	(96.000.000)	71 %
04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	136.300.000	136.300.000	0	0 %
04.0077	Belanja Sewa Peralatan Tukang Kayu	0	1.500.000	1.500.000	100 %
04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	40.000.000	121.000.000	81.000.000	203 %
04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.112.153.000	969.943.000	(142.210.000)	13 %
04.0122	Belanja Sewa Alat Dapur	0	1.500.000	1.500.000	100 %
04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	503.000.000	715.500.000	212.500.000	42 %
04.0134	Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	6.824.800	6.824.800	0	0 %
04.0300	Belanja Sewa Alat Pengukur Gelombang	8.000.000	0	(8.000.000)	100 %
04.0344	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	2.400.000	6.400.000	4.000.000	167 %
04.0351	Belanja Sewa Wave Generator and Absorber	0	5.000.000	5.000.000	100 %
04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	61.500.000	0	(61.500.000)	100 %
04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	90.000.000	0	(90.000.000)	100 %
04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	156.660.000	150.660.000	(6.000.000)	4 %

04 0465	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	0	120.000.000	120.000.000	100 %
04 0494	Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	13.500.000	13.500.000	0	0 %
05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.647.850.000	2.491.950.000	844.100.000	51 %
05 0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	100.000.000	100.000.000	0	0 %
05 0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	49.600.000	49.600.000	0	0 %
05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.222.000.000	1.471.000.000	249.000.000	20 %
05 0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	15.000.000	30.000.000	15.000.000	100 %
05 0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	261.250.000	841.350.000	580.100.000	222 %
07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	293.000.000	293.500.000	500.000	0 %
07 0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	278.000.000	278.500.000	500.000	0 %
07 0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	15.000.000	15.000.000	0	0 %
08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.991.048.881	5.517.056.888	3.526.008.007	177 %
08 0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Jasa Desain Arsitektural	1.210.997.028	1.061.574.000	(149.423.028)	12 %
08 0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	20.053.600	0	(20.053.600)	100 %
08 0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	49.328.456	49.328.456	0	0 %
08 0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	100.000.000	350.000.000	250.000.000	250 %
08 0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	80.000.000	650.698.432	570.698.432	713 %
08 0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0	1.100.978.000	1.100.978.000	100 %
08 0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	500.000.000	500.000.000	0	0 %
08 0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	0	1.100.000.000	1.100.000.000	100 %
08 0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	8.247.771	36.006.000	27.758.229	337 %
08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	22.422.026	668.472.000	646.049.974	2.881 %
09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	55.211.050	34.411.050	(20.800.000)	38 %
09 0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	34.411.050	34.411.050	0	0 %
09 0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	20.800.000	0	(20.800.000)	100 %
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.501.180.000	1.724.445.000	(776.735.000)	31 %
12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	397.000.000	419.350.000	22.350.000	6 %
12 0002	Belanja Sosialisasi	68.500.000	475.050.000	406.550.000	594 %
12 0003	Belanja Bimbingan Teknis	916.385.000	588.545.000	(327.840.000)	36 %
12 0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.119.295.000	241.500.000	(877.795.000)	78 %
	Belanja Pemeliharaan	5.961.362.450	3.070.282.560	(2.891.079.890)	48 %
31	Belanja Pemeliharaan Tanah	210.170.000	15.911.000	(194.259.000)	92 %
31 0001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	210.170.000	15.911.000	(194.259.000)	92 %
32	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.329.673.800	2.360.878.000	(968.795.800)	29 %
32 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.506.510.000	1.725.440.000	(781.070.000)	31 %
32 0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	60.000.000	46.350.000	(13.650.000)	23 %
32 0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	5.000.000	5.000.000	0	0 %
32 0066	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	175.000.000	175.000.000	0	0 %
32 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	28.670.000	2.440.000	(26.230.000)	91 %
32 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	255.800.000	162.490.000	(93.310.000)	36 %
32 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	13.074.000	4.106.000	(8.968.000)	69 %
32 0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	3.499.000	2.055.400	(1.443.600)	41 %

02 0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	180.000.000	0	(180.000.000)	100 %
02 0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	55.336.900	0	(55.336.900)	100 %
02 0131	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	23.583.900	14.796.600	(8.787.300)	37 %
02 0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	0	180.000.000	180.000.000	100 %
02 0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	5.000.000	25.000.000	20.000.000	400 %
02 0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	18.200.000	18.200.000	0	0 %
03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.742.358.650	593.493.560	(1.148.865.090)	66 %
03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	466.182.650	165.993.560	(300.189.090)	64 %
03 0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	180.000.000	110.000.000	(70.000.000)	39 %
03 0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0	120.000.000	120.000.000	100 %
03 0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	477.500.000	47.500.000	(430.000.000)	90 %
03 0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	45.000.000	0	(45.000.000)	100 %
03 0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	290.000.000	100.000.000	(190.000.000)	66 %
03 0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000	50.000.000	0	0 %
03 0046	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongannya	233.676.000	0	(233.676.000)	100 %
04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	500.000.000	0	(500.000.000)	100 %
04 0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	500.000.000	0	(500.000.000)	100 %
05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	179.160.000	10.000.000	(169.160.000)	94 %
05 0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	179.160.000	10.000.000	(169.160.000)	94 %
06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0	90.000.000	90.000.000	100 %
06 0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	0	90.000.000	90.000.000	100 %
07	Belanja Perjalanan Dinas	70.372.057.701	67.090.830.000	(3.281.227.701)	5 %
07 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	70.372.057.701	67.090.830.000	(3.281.227.701)	5 %
07 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.292.255.371	25.914.754.000	(3.377.501.371)	12 %
07 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	41.079.802.330	41.176.076.000	96.273.670	0 %
08	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	144.250.000	157.100.000	12.850.000	9 %
08 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	144.250.000	157.100.000	12.850.000	9 %
08 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	125.500.000	137.750.000	12.250.000	10 %
08 01 0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	18.750.000	19.350.000	600.000	3 %
09	Belanja Barang dan Jasa BOS	41.355.350.000	41.355.350.000	0	0 %
09 06	Belanja Barang dan Jasa BOS	41.355.350.000	41.355.350.000	0	0 %
09 06 0000	Belanja Barang dan Jasa BOS	41.355.350.000	41.355.350.000	0	0 %
10	Belanja Hibah	8.760.100.000	22.893.934.940	14.133.834.940	161 %
10 01	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	7.642.000.000	21.775.834.940	14.133.834.940	185 %
10 01 0001	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000.000	14.206.834.940	12.206.834.940	610 %
10 01 0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000.000	14.206.834.940	12.206.834.940	610 %
10 02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	195.000.000	0	(195.000.000)	100 %
10 02 0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	195.000.000	0	(195.000.000)	100 %
10 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.247.000.000	7.569.000.000	2.322.000.000	44 %
10 03 0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.247.000.000	7.569.000.000	2.322.000.000	44 %
10 06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	200.000.000	0	(200.000.000)	100 %
10 06 0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	200.000.000	0	(200.000.000)	100 %

	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.118.100.000	1.118.100.000	0	0 %
D1	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.118.100.000	1.118.100.000	0	0 %
D1.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.118.100.000	1.118.100.000	0	0 %
	Belanja Bantuan Sosial	4.028.325.000	3.605.629.990	(422.695.010)	10 %
	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.585.000.000	352.160.000	(1.232.840.000)	78 %
D1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.585.000.000	352.160.000	(1.232.840.000)	78 %
D1.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.585.000.000	352.160.000	(1.232.840.000)	78 %
	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0	2.327.189.990	2.327.189.990	100 %
D1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	0	2.327.189.990	2.327.189.990	100 %
D1.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	0	2.327.189.990	2.327.189.990	100 %
	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.443.325.000	926.280.000	(1.517.045.000)	62 %
D1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.443.325.000	926.280.000	(1.517.045.000)	62 %
D1.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.443.325.000	926.280.000	(1.517.045.000)	62 %
	BELANJA MODAL	131.526.192.578	161.950.825.258	30.424.632.680	23 %
	Belanja Modal Tanah	2.322.509.000	0	(2.322.509.000)	100 %
	Belanja Modal Tanah	2.322.509.000	0	(2.322.509.000)	100 %
	Belanja Modal Tanah Persil	2.322.509.000	0	(2.322.509.000)	100 %
D1.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	870.000.000	0	(870.000.000)	100 %
D1.0005	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	1.452.509.000	0	(1.452.509.000)	100 %
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.381.041.134	17.824.652.905	(2.556.388.229)	13 %
	Belanja Modal Alat Besar	280.174.500	246.000.000	(34.174.500)	12 %
	Belanja Modal Alat Besar Darat	280.174.500	246.000.000	(34.174.500)	12 %
D1.0011	Belanja Modal Mesin Proses	115.174.500	81.000.000	(34.174.500)	30 %
D1.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	165.000.000	165.000.000	0	0 %
	Belanja Modal Alat Angkutan	3.076.111.200	1.934.638.750	(1.141.472.450)	37 %
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.376.111.200	234.638.750	(1.141.472.450)	83 %
D1.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	711.111.200	234.638.750	(476.472.450)	67 %
D1.0005	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	665.000.000	0	(665.000.000)	100 %
	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	1.700.000.000	1.700.000.000	0	0 %
D1.0006	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	1.700.000.000	1.700.000.000	0	0 %
	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	150.000.000	112.500.000	(37.500.000)	25 %
D3	Belanja Modal Alat Ukur	150.000.000	112.500.000	(37.500.000)	25 %
D3.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	150.000.000	112.500.000	(37.500.000)	25 %
	Belanja Modal Alat Pertanian	0	596.000	596.000	100 %
D1	Belanja Modal Alat Pengolahan	0	596.000	596.000	100 %
D1.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	0	596.000	596.000	100 %
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.182.328.314	2.138.358.960	(1.043.969.354)	33 %
D1	Belanja Modal Alat Kantor	62.000.000	22.897.800	(39.102.200)	63 %
D1.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	62.000.000	22.897.800	(39.102.200)	63 %
D2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.910.744.214	1.507.467.560	(403.276.654)	21 %
D2.0001	Belanja Modal Mebel	103.000.000	702.850.000	599.850.000	582 %
D2.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	200.000	0	(200.000)	100 %

02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	357.348.900	94.040.700	(263.308.200)	74 %
02.0005	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.450.195.314	473.376.860	(976.818.454)	67 %
02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0	237.200.000	237.200.000	100 %
03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.209.584.100	607.993.600	(601.590.500)	50 %
03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	301.334.400	105.421.400	(195.913.000)	65 %
03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	26.796.600	43.296.600	16.500.000	62 %
03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	312.459.400	257.566.900	(54.892.500)	18 %
03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	294.425.800	56.346.600	(238.079.200)	81 %
03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	142.987.900	88.412.100	(54.575.800)	38 %
03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	131.580.000	56.950.000	(74.630.000)	57 %
	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	619.670.200	301.485.800	(318.184.400)	51 %
01	Belanja Modal Alat Studio	619.670.200	301.485.800	(318.184.400)	51 %
01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	133.259.800	78.839.800	(54.420.000)	41 %
01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	30.000.000	40.000.000	10.000.000	33 %
01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	301.300.000	55.650.000	(245.650.000)	82 %
01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	152.243.900	126.996.000	(25.247.900)	17 %
01.0005	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	2.866.500	0	(2.866.500)	100 %
	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	9.159.167.795	9.013.480.295	(145.687.500)	2 %
01	Belanja Modal Alat Kedokteran	920.000.000	920.000.000	0	0 %
01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	920.000.000	920.000.000	0	0 %
02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	8.239.167.795	8.093.480.295	(145.687.500)	2 %
02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	8.239.167.795	8.093.480.295	(145.687.500)	2 %
	Belanja Modal Alat Laboratorium	780.208.500	1.075.874.600	295.666.100	38 %
01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	385.900	0	(385.900)	100 %
01.0004	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	385.900	0	(385.900)	100 %
03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	625.000.000	625.000.000	0	0 %
03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	625.000.000	625.000.000	0	0 %
08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	154.822.600	450.874.600	296.052.000	191 %
08.0005	Belanja Modal Peralatan Umum	154.822.600	450.874.600	296.052.000	191 %
	Belanja Modal Komputer	3.067.730.625	2.540.778.500	(526.952.125)	17 %
01	Belanja Modal Komputer Unit	1.823.720.625	1.508.778.500	(314.942.125)	17 %
01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	585.000.000	592.500.000	7.500.000	1 %
01.0002	Belanja Modal Personal Computer	30.000.000	30.000.000	0	0 %
01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.208.720.625	886.278.500	(322.442.125)	27 %
02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.244.010.000	1.032.000.000	(212.010.000)	17 %
02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	49.620.000	24.360.000	(25.260.000)	51 %
02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	148.910.000	0	(148.910.000)	100 %
02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	844.000.000	827.000.000	(17.000.000)	2 %
02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	201.480.000	180.640.000	(20.840.000)	10 %
	Belanja Modal Alat Eksplorasi	30.000.000	7.500.000	(22.500.000)	75 %
01	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	30.000.000	7.500.000	(22.500.000)	75 %
01.0003	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	30.000.000	7.500.000	(22.500.000)	75 %

	Belanja Modal Peralatan Olahraga	35.650.000	453.440.000	417.790.000	1.172 %
01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	35.650.000	453.440.000	417.790.000	1.172 %
01.0003	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	35.650.000	453.440.000	417.790.000	1.172 %
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.460.169.665	55.262.710.261	11.802.540.596	27 %
	Belanja Modal Bangunan Gedung	42.500.156.665	51.666.325.150	9.166.168.485	22 %
01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	42.485.832.665	51.666.325.150	9.180.492.485	22 %
01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	11.053.720.000	4.759.184.000	(6.294.536.000)	57 %
01.0005	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	4.405.625.000	4.819.700.000	414.075.000	9 %
01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	4.662.070.000	5.605.196.400	943.126.400	20 %
01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	566.000.000	547.616.000	(18.384.000)	3 %
01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	19.116.757.665	34.967.341.250	15.850.583.585	83 %
01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	57.210.000	0	(57.210.000)	100 %
01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.495.000.000	337.287.500	(1.157.712.500)	77 %
01.0020	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	940.000.000	630.000.000	(310.000.000)	33 %
01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	189.450.000	0	(189.450.000)	100 %
02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	14.324.000	0	(14.324.000)	100 %
02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	14.324.000	0	(14.324.000)	100 %
	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	960.013.000	3.596.385.111	2.636.372.111	275 %
01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	960.013.000	3.596.385.111	2.636.372.111	275 %
01.0004	Belanja Modal Pagar	960.013.000	3.596.385.111	2.636.372.111	275 %
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.087.472.779	88.558.982.092	23.471.509.313	36 %
	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	55.609.922.779	77.875.915.879	22.265.993.100	40 %
01	Belanja Modal Jalan	54.585.402.779	63.967.248.879	9.381.846.100	17 %
01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	50.914.688.130	62.227.248.879	11.312.560.749	22 %
01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	2.470.000.000	590.000.000	(1.880.000.000)	76 %
01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.200.714.649	1.150.000.000	(50.714.649)	4 %
02	Belanja Modal Jembatan	1.024.520.000	13.908.667.000	12.884.147.000	1.258 %
02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	650.000.000	12.938.667.000	12.288.667.000	1.891 %
02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	374.520.000	970.000.000	595.480.000	159 %
	Belanja Modal Bangunan Air	7.987.550.000	9.633.066.213	1.645.516.213	21 %
01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	270.000.000	1.205.000.000	935.000.000	346 %
01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	270.000.000	1.205.000.000	935.000.000	346 %
04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	6.816.000.000	154.339.200	(6.661.660.800)	98 %
04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.481.000.000	0	(3.481.000.000)	100 %
04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	3.335.000.000	154.339.200	(3.180.660.800)	95 %
06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	271.550.000	5.842.467.013	5.570.917.013	2.052 %
06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	271.550.000	5.842.467.013	5.570.917.013	2.052 %
07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	630.000.000	2.431.260.000	1.801.260.000	286 %
07.0004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	230.000.000	0	(230.000.000)	100 %
07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	400.000.000	2.431.260.000	2.031.260.000	508 %
	Belanja Modal Instalasi	1.000.000.000	1.050.000.000	50.000.000	5 %
07	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %

20004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
0	Belanja Modal Instalasi Lain	0	50.000.000	50.000.000	100 %
20001	Belanja Modal Instalasi Lain	0	50.000.000	50.000.000	100 %
	Belanja Modal Janingan	490.000.000	0	(490.000.000)	100 %
	Belanja Modal Janingan Air Minum	490.000.000	0	(490.000.000)	100 %
20005	Belanja Modal Janingan Air Minum Lainnya	490.000.000	0	(490.000.000)	100 %
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	275.000.000	304.480.000	29.480.000	11 %
	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	105.000.000	105.000.000	0	0 %
	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	105.000.000	105.000.000	0	0 %
0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	105.000.000	105.000.000	0	0 %
	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	170.000.000	199.480.000	29.480.000	17 %
	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	170.000.000	199.480.000	29.480.000	17 %
0007	Belanja Modal Alat Musik	0	114.480.000	114.480.000	100 %
10004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	170.000.000	85.000.000	(85.000.000)	50 %
	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.826.053.105	3.019.672.605	(806.380.500)	21 %
	Belanja Tidak Terduga	3.826.053.105	3.019.672.605	(806.380.500)	21 %
	Belanja Tidak Terduga	3.826.053.105	3.019.672.605	(806.380.500)	21 %
	Belanja Tidak Terduga	3.826.053.105	3.019.672.605	(806.380.500)	21 %
10001	Belanja Tidak Terduga	3.826.053.105	3.019.672.605	(806.380.500)	21 %
	BELANJA TRANSFER	149.293.763.600	151.737.493.600	2.443.730.000	2 %
	Belanja Bantuan Keuangan	149.293.763.600	151.737.493.600	2.443.730.000	2 %
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	149.293.763.600	151.737.493.600	2.443.730.000	2 %
	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	58.496.651.400	58.496.651.400	0	0 %
10001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	58.496.651.400	58.496.651.400	0	0 %
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	90.797.112.200	93.240.842.200	2.443.730.000	3 %
20004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	89.792.401.000	92.236.131.000	2.443.730.000	3 %
20005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	1.004.711.200	1.004.711.200	0	0 %
	Jumlah Belanja	988.121.933.348	1.002.413.591.489	14.291.658.141	1 %
	Total Surplus/(Defisit)	(32.730.409.848)	(27.993.830.989)	4.736.578.859	-14 %
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.480.409.848	30.743.830.989	(4.736.578.859)	13 %
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	35.480.409.848	30.743.830.989	(4.736.578.859)	13 %
	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	35.480.409.848	30.743.830.989	(4.736.578.859)	13 %
	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	35.480.409.848	30.743.830.989	(4.736.578.859)	13 %
0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	35.480.409.848	30.743.830.989	(4.736.578.859)	13 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	35.480.409.848	30.743.830.989	(4.736.578.859)	13 %
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.750.000.000	2.750.000.000	0	0 %
	Penyertaan Modal Daerah	2.750.000.000	2.750.000.000	0	0 %
	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.750.000.000	2.750.000.000	0	0 %
	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.750.000.000	2.750.000.000	0	0 %
0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.750.000.000	2.750.000.000	0	0 %

	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.750.000.000	2.750.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	32.730.409.848	27.993.830.989	(4.736.578.859)	14 %
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Pj. Bupati Seram Bagian Barat



ANDI CHANDRA AS'ADUDDIN



20/11/2023, 12:4